

**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN ATAS PERIZINAN MIGAS DI
KABUPATEN BANGGAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

NIZLAWATI MS. KONO / D 101 09 365

ABSTRAKSI

*Masuknya kegiatan usaha perusahaan PT. DS-LNG (Donggi-Senoro Liquid Natural Gas) di Kecamatan Batui kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat mampu mendorong peningkatan pendapatan regional maupun nasional. Pembangunan proyek pengembangan Gas itu dibagi dengan dua konsep yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Adapun dalam penulisan ini, penulis mengangkat judul “**Pengendalian Kerusakan Lingkungan Atas Perizinan Migas Di Kabupaten Banggai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.***

Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup di mana UU tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum, khususnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh DS-LNG yang akan menimbulkan risiko positif ataupun negatif.

Dari uraian di atas, penulis mencoba mengangkat masalah: (1) Apakah kegiatan pengolahan proyek pengembangan Gas DS-LNG berisiko menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat; (2) Bagaimana pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan atas pengolahan Gas oleh DS-LNG menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana metode penelitian ini mengkaji asas-asas hukum dan sistematika hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Semua data kepustakaan dikumpulkan, kemudian dianalisis dan hasilnya dituangkan dalam bentuk deskriptif. Jadi berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa proyek pengembangan Gas DS-LNG dapat menimbulkan risiko negatif maupun positif.

Kata Kunci : Pengendalian dan pencegahan, dampak/risiko terhadap lingkungan hidup

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan proyek pengembangan Gas bumi PT. DS-LNG (Donggi-Senoro Liquid Natural Gas) terbagi atas dua konsep yaitu pembangunan hulu dan hilir. Kegiatan usaha hulu merupakan kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir merupakan kegiatan usaha yang

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.

Terkait mengenai pembangunan dan pengolahan Gas Bumi oleh DS-LNG merencanakan membangun fasilitas terminal khusus LNG untuk melayani kegiatan operasional kilang LNG dalam hal angkutan bahan baku.

Sektor Hulu PPGM (Proyek Pengembangan Gas Matindok), merupakan kegiatan pembangunan fasilitas yang lengkap mulai dari memproduksi Gas Bumi dan sumur yang telah dieksplorasi. Namun dari rencana sumur pengembangan yang berasal dari 5 (lima) lapangan Gas Bumi yaitu: lapangan Gas Donggi, Matindok, Maleo Raja, Sukamaju, dan Minahaki, adapun Gas disalurkan melalui pipa menuju kilang LNG.¹

Secara demografis tempat/lokasi Pembangunan pengolahan Gas begitu dekat dengan pemukiman penduduk, kondisi ini cukup ironis dan menjadi perhatian bersama ketika pengolahan gas tersebut mulai operasional/produksi, dan tidak menutup kemungkinan akan membawa risiko besar bagi kelanjutan kehidupan manusia dan lingkungan.

Kegiatan usaha pengembangan Gas akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, teknologi dan meningkatkan perkembangan daerah, tetapi di sisi lain Pembangunan terminal khusus LNG ataupun pembangunan pada sektor hulu PPGM diperkirakan akan menimbulkan risiko/dampak negatif terhadap berbagai komponen lingkungan hidup baik lingkungan fisik, biologi, sosial ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat.²

¹. Dalam hal ini Donggi-Senoro LNG atau DS-LNG yang selanjutnya dipasarkan melalui pelabuhan menggunakan kapal tanker LNG.

². Studi Analisis Risiko Lingkungan, *Kerjasama antara DS-LNG dan PPLH UNTAD*, hlm. 1-2.

DS-LNG yang melakukan studi analisis risiko lingkungan ataupun PT. PERTAMINA EP-PPGM yang wajib melakukan studi AMDAL karena kegiatan itu diperkirakan akan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Kegiatan studi AMDAL tersebut, sebagai upaya sedini mungkin untuk menanggulangi dan mencegah adanya dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diperkirakan akan timbul.

Sehingga diharapkan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif, bahkan dapat memberikan manfaat kepada para pelaku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dan tetap memperhatikan risiko dari kegiatan proyek pengembangan gas tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah kegiatan pengolahan proyek pengembangan Gas DS-LNG berisiko menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat.?
2. Bagaimana pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan atas pengolahan Gas oleh DS-LNG berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.?

II. PEMBAHASAN

A. Tempat Usaha PT. DS-LNG

Perusahaan DS-LNG di Desa Uso Kecamatan Batui maupun sumur pengembangan yang berasal dari 5 (lima) lapangan Gas Bumi yaitu: lapangan Gas Donggi, Matindok, Maleo Raja, Sukamaju, dan Minahaki. Selain akan memajukan daerah tersebut, juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, sehingga kesempatan untuk meningkatkan pendapatan untuk keluarga akan terbuka lebar. Oleh karena itu, mereka berharap agar perusahaan dapat merekrut tenaga-tenaga kerja lokal sebagai karyawan pada perusahaan.

Sebagian kecil warga masyarakat yang kurang sependapat terhadap keberadaan proyek pengembangan Gas itu. Maka menjadi tanggung jawab pihak pemrakarsa untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi proyek kepada masyarakat setempat, agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas rencana pembangunan proyek tersebut, dimana berkaitan dengan dampak yang diperkirakan akan timbul.

Dengan adanya konsep bisnis Hulu dan Hilir,³ maka tanggungjawab pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hasil kajian ANDAL⁴ (Analisis Dampak Lingkungan) juga

di pisahkan mengacu kepada konsep yang di jelaskan di dalam dokumen ANDAL. Secara substantif dokumen ANDAL tersebut, pada dasarnya menggambarkan mengenai rencana-rencana kegiatan dan perkiraan dampak besar dan penting yang akan timbul dan mengganggu kondisi lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen ANDAL dapat disesuaikan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan itu merupakan langkah-langkah strategis dan praktis dalam melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau kerusakan akibat kegiatan perusahaan industri MIGAS.⁵ Adapun pengelolaan lingkungan di bagian hulu menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh PT. PERTAMINA EP dan pengelolaan lingkungan di bagian hilir menjadi tanggung jawab PT. DS-LNG.

B. Risiko Lingkungan Atas Pengolahan Pengembangan Gas PT. DS-LNG

Berdasarkan uraian di atas, maka pihak DS-LNG melakukan studi analisis terhadap

³. RKL Proyek Pengembangan Gas Matindok, tahun 2008, Bab 1 hlm. 2.

⁴. Salah satu kelengkapan dokumen studi kelayakan lingkungan hidup lainnya yang merupakan bagian penting dalam AMDAL yaitu ANDAL. Dalam ketentuan PP No. 27 Tahun 1999 dinyatakan bahwa ANDAL adalah merupakan telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Penyusunan dokumen ANDAL adalah bertujuan untuk mengetahui komponen

kegiatan yang dapat menimbulkan dampak; komponen lingkungan yang terkena dampak; serta sebagai dasar atau arahan pengelolaan dan pemantauan. Berdasarkan kegunaan ANDAL tersebut, pada dasarnya semua rencana usaha atau kegiatan tercantum dalam dokumen ANDAL memuat beberapa tahapan yaitu: (1) Tahapan perencanaan, pematangan rencana, dan pembebasan lahan (pra konstruksi); (2) Tahapan pembangunan fisik (konstruksi); (3) Tahapan berproduksi (operasi), dan (4) Tahapan kegiatan berhenti (pasca operasi). Erri N. Megantara, *Pengertian, Proses, Dan Metode Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bandung, 2003, hlm. 7.

⁵. Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing), Malang, 2010, hlm. 117.

berbagai risiko yang muncul, adapun risiko itu antara lain:⁶

1. Tahap pra konstruksi: Penerimaan tenaga kerja/Sekitar lokasi terminal khusus LNG di Desa Uso (Terbukanya kesempatan bekerja, peningkatan pendapatan masyarakat, persepsi masyarakat terhadap proyek);
2. Tahap konstruksi
 - Mobilisasi dan demobilisasi peralatan, material dan tenaga kerja/jalan raya sepanjang pelabuhan perintis BSS Desa Lamo rencana lokasi konstruksi MOF Desa Uso dan masyarakat di Desa Uso (Peningkatan kebisingan, peningkatan kadar debu, risiko kecelakaan lalu lintas darat dan laut, pemanfaatan tenaga kerja dan terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha, dan persepsi masyarakat);
 - Konstruksi terminal khusus LNG beserta fasilitas pendukungnya/tapak proyek terminal khusus LNG di desa Uso (peningkatan kadar debu, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air laut, penurunan biota air laut,

pemanfaatan tenaga kerja dan peluang berusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan persepsi masyarakat.

3. Tahap beroperasi
 - Penerimaan tenaga kerja/masyarakat sekitar Kec. Batui, Kec. Kintom, Kabupaten Banggai dan sekitarnya (pemanfaatan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, proses-proses sosial, terganggunya keamanan dan ketertiban, dan persepsi masyarakat terhadap proyek);
 - Operasional pelabuhan khusus LNG/sekitar terminal khusus LNG di Desa Uso (penurunan kualitas udara, kebisingan, penurunan kualitas air laut, terganggunya kehidupan biota laut, keselamatan pelayaran, kesehatan dan keselamatan kerja, terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha, gangguan kesehatan masyarakat, kamtibmas, menurunnya hasil tangkapan nelayan, kebocoran dan kebakaran gas, dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan

⁶. *Ibid*, Bab V hlm. 57-58.

- operasional terminal khusus masyarakat, penurunan LNG; kesempatan berusaha,
- Pemeliharaan fasilitas perubahan sikap dan persepsi LNG/sekitar terminal khusus masyarakat, dan peningkatan LNG di Desa Uso (perubahan kerawanan sosial. kualitas udara, perubahan Seperti yang dikemukakan di atas, kualitas air laut, kebocoran dan bahwa kategori semua aspek lingkungan kebakaran gas, keselamatan sensitif tersebut, sudah sesuai dengan besaran dan kesehatan kerja dan dan risiko yang ada, sehingga risiko-risiko itu persepsi masyarakat). harus dikelola dan dipantau oleh pihak pemrakarsa PT. DS-LNG. Jadi hasil studi dan
4. Tahap pasca operasi analisis yang dilakukan DS-LNG atas risiko-
- Penghentian operasi/di tapak risiko yang akan timbul dikemudian hari itu, proyek terminal khusus LNG akan menjadi pegangan baik bagi (persepsi masyarakat terhadap pemrakarsa/DS-LNG, pemerintah, dan kinerja perusahaan secara masyarakat. keseluruhan, peningkatan
- C. Pengendalian Dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
- Sebagaimana uraian di atas, sangat relevan dengan UU No. 32 Tahun 2009 UUPPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dimana UU ini menyediakan instrumen pengendalian dan pencegahan. Adapun instrumen pengendalian dijelaskan dalam bab V bagian kesatu umum bahwa:
- Demobilisasi alat dan bahan/di tapak proyek terminal khusus LNG (peningkatan kepadatan lalu lintas laut dan darat, peningkatan risiko, dan perubahan sikap dan persepsi masyarakat);
 - Demobilisasi alat dan bahan/di tapak proyek terminal khusus LNG (peningkatan kepadatan lalu lintas laut dan darat, peningkatan risiko, dan perubahan sikap dan persepsi masyarakat);
 - Pengelepasan tenaga kerja/khususnya Kec. Batui dan Kec. Kintom, Kabupaten Banggai umumnya (peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan
- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Sedangkan mengenai instrumen pencegahan dijelaskan di bagian kedua Pasal 14 bahwa:

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS (Kajian lingkungan hidup strategis);
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan);
- f. UKL (Upaya pengelolaan lingkungan hidup) dan UPL (Upaya pemantauan lingkungan hidup);

- g. Perizinan;
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam ketentuan di atas antara lain:

Pengendalian:

- a. Pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Sedangkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf b mengenai dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. Perubahan iklim;
- b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Instrumen hukum di atas terkait mengenai pengendalian dan pencegahan dalam hal kegiatan usaha pengembangan Gas DS-LNG di Desa Uso Kec batui yang membawa dampak/risiko negatif maupun positif bagi lingkungan hidup, akan sangat bermanfaat bagi setiap pelaksanaan pembangunan yang berada di Indonesia, khususnya daerah sebagai penghasil SDA (Sumber Daya Alam).

D. PERIZINAN MIGAS PT. DS-LNG

Terkait izin⁷ sangat berkaitan dengan pengolahan MIGAS di Kecamatan Batui

Kabupaten banggai, karena tanpa izin suatu kegiatan usaha tidak dapat berjalan. Pengolahan kegiatan usaha industri MIGAS mulai dari hulu sampai ke hilir sangat bersentuhan dengan perizinan, karena izin tersebut sangat penting tanpa izin pun pengolahan MIGAS itu tidak dapat terlaksana.

Sebagaimana prosedur dan mekanisme yang berlaku untuk mendapatkan izin, harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satu diantaranya harus mempunyai dokumen AMDAL, dan beberapa rekomendasi terkait pengelolaan migas lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pengembangan kegiatan usaha pengolahan Gas DS-LNG di Batui dipisahkan dengan mengacu pada konsep pengembangan hulu dan hilir.⁸ Namun prosedur dan mekanisme yang berlaku untuk mendapatkan izin, harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satu diantaranya harus mempunyai dokumen AMDAL, dan beberapa rekomendasi terkait pengelolaan migas lainnya.

⁷. Pengertian izin secara luas adalah suatu instrumen atau sarana yuridis yang mengandung suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup pengertian izin secara normatif dapat ditemukan dalam ketentuan UUPPLH, UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Perbedaan perizinan dengan izin secara normatif dapat ditemukan dalam ketentuan UU PLH Bab IV, penjelasan pasal 18 UU

Otda, penjelasan pasal 7 PP Nomor 27 Tahun 1999, pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 2000. Pada ketiga produk hukum tersebut yang pertama adalah ditetapkannya izin sebagai bagian dari perizinan yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan pada pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 2000, ditetapkan izin sebagai salah satu jenis perizinan disamping dalam bentuk rekomendasi, persetujuan, tanda daftar dan lain sebagainya.

⁸.RKL Proyek Pengembangan Gas Matindok, Tahun 2008, *Op.,Cit*, Bab I hlm. 2.

Untuk mendapatkan izin harus memenuhi beberapa syarat tertentu, terkait dengan hal itu, selain dokumen AMDAL ada juga rekomendasi-rekomendasi terkait pengolahan Gas tersebut. Adapun rekomendasi yang dimaksud tentang kegiatan eksplorasi pemboran MIGAS sumur matindok⁹ dan izin lokasi pengadaan tanah¹⁰ di Desa Masing Kecamatan Batui Kabupaten Banggai maupun beberapa izin terkait pengolahan tersebut,¹¹ dalam pemberian izin

⁹. Bupati Banggai Rekomendasi Nomor:005/1873/BAG. TAPEM tentang kegiatan eksplorasi pemboran MIGAS sumur Matindok (MTD)-B Desa Masing Kecamatan Batui. Menunjuk surat manajer operasi eksplorasi PT. PERTAMINA EP Nomor: 415/EP2035/2007-SO Tanggal 13 Agustus 2007 perihal permohonan izin prinsip lokasi matindok (MTD)-B untuk keperluan eksplorasi, maka Bupati Banggai atas nama pemerintah daerah tidak keberatan atas izin lokasi dan pengadaan tanah di Desa Masing Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, Luwuk 21 agustus 2007 Bupati banggai Ma'mun Amir.

¹⁰. Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 593/411/BAG. TAPEM tentang Izin lokasi dan pengadaan tanah untuk proyek kilang LNG di Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, Dasar: 1. Surat PT. MEDCO LNG INDONESIA Nomor: LNG-003/JKT/08, Tanggal 21 Januari 2008, perihal pengalihan izin lokasi dan pengadaan tanah untuk proyek LNG kepada PT. DONGGI-SENORO LNG. 2. Surat PT. DONGGI-SENORO LNG Nomor: MGT-003/JKT/08, Tanggal 21 Januari 2008, perihal permohonan izin lokasi dan pengadaan tanah untuk proyek LNG, Luwuk 25 Januari 2008 Bupati Banggai Ma'mun Amir.

¹¹. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL, Nomor: 1128/I/PMA/2007, Nomor Kode Proyek: 2320-72-21649. Sehubungan dengan permohonan tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, memberikan penanaman modal dan memberikan persetujuan penanaman modal yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh izin usaha, Jakarta 04 September 2007 a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Ahmad Kurniadi.

kedudukan pemerintah sebagai pelaksana kewenangan sangatlah dominan.

Seperti mengacu pada pengolahan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir¹². Sementara kegiatan hilir¹³ diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

E. Urgensi Pengelolaan Lingkungan Dan Peranan AMDAL Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup

Pada sektor pembangunan hulu¹⁴ maupun sektor pembangunan hilir ada beberapa risiko-risiko yang akan timbul nanti. Berbagai upaya pengendalian risiko penting, baik untuk pencegahan, penanggulangan, maupun pengembangan atas risiko yang ditimbulkan oleh pembangunan dan

¹². H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 236-237. Kegiatan usaha dilaksanakan dan dikendalikan melalui KKS (Kontrak Kerjasama), KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

¹³. Kegiatan yang bertumpu pada usaha: (1) Pengolahan; (2) Pengangkutan; (3) Penyimpanan; dan (4) Niaga. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

¹⁴. Risiko-risiko lingkungan yang mungkin terjadi akibat adanya pembangunan LNG dan fasilitas pendukung lainnya wilayah Desa Uso Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, meliputi 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu tahap konstruksi, tahap operasi, serta tahap pasca operasi terhadap komponen lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Semua aspek lingkungan tersebut.

operasional DS-LNG dan fasilitas penunjang lainnya.

Pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi, dan budaya serta pendekatan institusi/kelembagaan.¹⁵ Pengelolaan lingkungan terhadap komponen lingkungan tersebut yang mengalami perubahan mendasar/dampak penting baik positif maupun negatif sebagai akibat dari rencana kegiatan Proyek Pengembangan Gas baik yang berada pada sektor hulu maupun hilir.

Rencana pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan DS-LNG disusun berdasarkan pada bentuk kegiatan yang menjadi sumber risiko pada setiap komponen/parameter lingkungan yang diperkirakan terkena risiko penting oleh rencana kegiatan pembangunan dan

¹⁵. Pendekatan teknologi sebagai salah satu alternatif pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu pendekatan yang menggunakan cara atau teknologi untuk mengelola risiko penting. Beberapa teknologi yang tersedia di bidang perminyakan saat ini untuk berbagai upaya penanganan risiko penting, yang telah dilengkapi dengan *Standard Operation Procedure (SOP)*, meliputi: (a) Teknologi pengelolaan limbah cair dan limbah padat; (b) Teknologi penanganan limbah B3; (c) Teknologi dan sistem penanggulangan tanggap darurat operasi. Sosial ekonomi, dalam pengelolaan lingkungan pemrakarsa akan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menanggulangi risiko sosial ekonomi dan budaya yang timbul akibat kegiatan pembangunan dan operasional terminal khusus LNG, Sementara pendekatan kelembagaan institusi/pendekatan institusional sebagai salah satu alternatif pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu pendekatan yang melibatkan institusi kelembagaan dalam pengelolaan. Dalam penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup pembangunan dan operasional terminal khusus LNG. Dengan mempertimbangkan fungsi pelayanan kelembagaan formal dan informal.

operasional terminal khusus LNG. Hal di atas telah sesuai dengan hasil studi risiko lingkungan DS-LNG tersebut, di mana pengelolaan akan difokuskan kepada risiko yang bersifat penting, baik positif maupun negatif.

Selain itu berdasarkan hasil kajian studi ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) rencana kegiatan PPGM diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan.¹⁶ Dampak negatif yang diperkirakan timbul diupayakan untuk ditanggulangi dan dicegah, sedangkan dampak positifnya akan dikembangkan melalui pengelolaan lingkungan.

Adapun RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dapat digunakan sebagai upaya pemantauan dan penanggulangan dampak negatif, serta mengembangkan dampak positif yang ada, sehingga lingkungan di dalam dan di sekitar kegiatan PPGM dapat terjaga kualitasnya.

Begitu luasnya area/wilayah DS-LNG, khususnya PPGM yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu diikutsertakan RKL¹⁷

¹⁶. RPL Proyek Pengembangan Gas Matindok, Tahun 2008.

¹⁷. RKL merupakan salah satu upaya untuk menangani dan mengelola lingkungan dalam melaksanakan proyek PPGM di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. RKL sebuah dokumen penting bagi pemrakarsa, pemda, dan masyarakat.

(Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL¹⁸ (Rencana Pemantauan Lingkungan), mulai dari kegiatan pra konstruksi sampai tahap pasca operasi. Berhasil tidaknya pelaksanaan pengelolaan lingkungan tersebut, dapat diketahui melalui upaya RKL dan RPL.

Sementara itu, dokumen RKL¹⁹ merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Sedangkan RPL merupakan rencana yang disusun berkenaan dengan pengulangan pengukuran komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu, guna mengetahui adanya perubahan lingkungan karena pengaruh kegiatan atau proyek tersebut.

Dengan demikian yang terkandung dalam pemantauan tersebut adalah sejauhmana aktivitas proyek menimbulkan perubahan pada lingkungan, guna mengetahui sejauhmana pula efektivitas peralatan pengendalian pencemaran yang dipergunakan.²⁰

III. PENUTUP

C. Kesimpulan

¹⁸. RPL merupakan salah satu upaya untuk memantau pelaksanaan dan hasil pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan PPGM.

¹⁹. RM. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 174.

²⁰. Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 121.

1. Proyek pengembangan Gas DS-LNG dapat menimbulkan risiko negatif maupun positif. Dengan berbagai risiko-risiko yang akan timbul nanti dan kegiatan proyek DS-LNG memenuhi kriteria proyek yang mengharuskan wajib melakukan studi AMDAL. Adapun risiko itu meliputi 3 tahapan yaitu tahap konstruksi, tahap operasi, serta tahap pasca operasi baik terhadap komponen lingkungan fisik kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
2. Melalui AMDAL merupakan salah satu cara pengendalian dan pencegahan yang efektif. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL. Selain AMDAL sebagai instrumen hukum administrasi lingkungan dan secara substantif harus juga memiliki dokumen-dokumen studi kelayakan lingkungan berupa KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL. Adapun dokumen terkait itu sebagai upaya-upaya untuk mengendalikan dan mencegah dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dapat membuat dan menyusun rancangan Perda (Peraturan

Daerah), terkait mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas pengolahan pertambangan gas bumi di Desa Uso Kecamatan Batui dan dalam tahun ini segera masuk dalam Prolegda (program legislatif daerah) Kabupaten Banggai 2014.

2. Penulis mengharapkan agar penelitian/penulisan ini menjadi bahan
- 3.

referensi dan masukan bagi ilmu hukum, khususnya Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan. Sehingga gagasan atau wacana terkait mengenai pengembangan gas yang membawa risiko negatif dan positif dalam menjaga fungsi kualitas lingkungan hidup dapat terlindungi dan terjaga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Erri N. Megantara, *Pengertian, Proses, Dan Metode Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bandung, 2003.
- Harun M Husein. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Laporan Final Studi Analisis Resiko Lingkungan Terminal Khusus LNG Donggi-Senoro (*Kerjasama PT. Donggi-Senoro LNG Dengan PPLH- UNTAD November 2008*).
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing), Malang, 2010.
- PT. Pertamina EP-Proyek Pengembangan Gas Matindok, *RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) Dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup)*, Jakarta, Tahun 2008.
- RM. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Bupati Banggai Rekomendasi Nomor: 005/1873/BAG. TAPEM Tentang Kegiatan Eksplorasi Pemboran Migas Sumur Matindok (MTD)-B Desa Masing Kecamatan Batui, Perihal

Permohonan Izin Lokasi Matindok Untuk Keperluan Eksplorasi, Luwuk 21 Agustus 2007.

Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 593/411/BAG. TAPEM Tentang Izin Lokasi Dan Pengadaan Tanah Untuk Proyek Kilang LNG Di Desa Uso, Luwuk 25 Januari 2008.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL, Nomor: 1128/I/PMA/2007, Nomor Kode Proyek: 2320-72-21649. Sehubungan dengan permohonan tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, memberikan penanaman modal dan memberikan persetujuan penanaman modal yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh izin usaha, Jakarta 04 September 2007 a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Ahmad Kurniadi.

BIODATA PENULIS



Nama	: Nizlawati MS. Kono
TTL	: Luwuk. 4 April 1991
Agama	: Islam
Alamat	: Lrg. Nangka
No. Telp	: 085656511603
Alamat E-Mail	: Nizlawati@yahoo.co.id